

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT PEMERINTAH
KABUPATEN ENREKANG**

NIRMA

105730438513



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

MOTTO HIDUP

“Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa
menghadapi masalah,tantangan dan hambatan secara mandiri

“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena
dengan Pendidikan mampu mengubah dunia” – Nelson Mandela



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah
Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Nirma
Stambuk : 10573 04385 13
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Selasa, 3 Juli 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 3 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing I



Dardham Khalid.MM

Pembimbing II



Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,Ak.CA

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,Ak.CA
NBM :1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Nirma, Nim : 105730438513 , diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : _____, Tanggal 3 Juli / 2018, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Syawal 1439H
3 Juli 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim H R, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr.Agus Salim H R, SE., MM
 2. Ismail Badollahi,SE.,M.SI.,AK.CA
 3. Muttiarni, SE.,M.SI
 4. Faidhul Adzhim, SE.,M.SI

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIRMA
Stambuk : 105730438513
Jurusan : Akuntansi
Dengan : *Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah
Judul : Kabupaten Enrekang .

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh :

Pembimbing I

Dr.Idham Khalid.MM

Pembimbing II

Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA

Abstrak

Nirma 2018. **Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang**, Dibimbing oleh Dr.Idham Khalid.MM, dan Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2012-2014 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Inspektorat Kabupaten Enrekang pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus : Rasio keserasian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dilihat dari Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 95,38% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 95,52% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dilihat dari Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 95,38% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 95,52% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah

Kata Kunci : Kinerja Keuangan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'aalamiin*. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “**Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman suram ke zaman terang-benderang seperti sekarang ini.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terimakasih kepada :

1. Allah swt. atas segala nikmat dan hidayah serta kesehatan yang telah diberikan;
2. Rasa *ta'dzim* dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Lancangi dan Ibunda Hania atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.
3. Bapak Dr.H.Abd.Rahman Rahim.SE,.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
1. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku pembimbing II yang sekaligus ketua jurusan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar, yang mana dengan tulus hati menempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan saran kepada penulis selama penyusunan sampai terselesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr.Idham Khalid MM,. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk,bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar yang telah memberikan ilmu,perhatian serta nasihat kehidupan yang berguna kepada semua mahasiswanya tak terkecuali penulis.
7. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dan perpustakaan-perpustakaan Universitas lain yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
8. Kepada teman-teman angkatan 2013, khususnya AK 8-13 Dan sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.
9. Serta untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah.Dengan segala kelemahan dan kekurangan,semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya,Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita.*Amin*.

Makassar , Juli 2018

Nirma

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori	8

1. Pengertian Kinerja keuangan	8
2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	10
3. Indikator Kinerja Keuangan	10
4. Laporan Keuangan	11
5. Analisis kinerja keuangan.....	14
a. Rasio kemandirian keuangan daerah	15
b. Rasio efektivitas PAD.....	16
c. Rasio keserasian	16
B. Penelitian Terdahulu.....	17
C. Kerangka Pikir	32
BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Metode analisis data	34
E. Definisi operasional dan pengukuran	36
BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	38
A. Sejarah Tempat Penelitian	38
B. Visi dan Misi	40
C. Struktur Organisasi	42
D. Tugas pokok dan fungsi	43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.....	50
B. Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Enrekang.....	52
1. Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2014.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB VI : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja.....	2
2.	Pola Hubungan dan Tingkatan Kemampuan Daerah.....	16
3.	Hasil Penelitian Terdahulu	22
4.	Realisi Anggaran dan Belanja tahun 2012.....	57
5.	Realisasi Anggaran dan Pendapatan tahun 2013.....	57
6.	Realisasi Anggaran dan Pendapatan tahun 2014.....	58
7.	Rasio Keuangan Inspektorat Kab. Enrekang.....	62

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
2.1	Skema Kerangka pemikiran	36
2.2	Struktur Organisasi	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan Negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlab, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, social dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak bulan januari tahun 2001 yang sekarang menjai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang

lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana pertimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana pertimbangan. Dana pertimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Salah satu ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat proporsi ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin kecil dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Prinsip otonomi daerah antara lain Darise (2007) : prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata dan prinsip otonomi yang bertanggungjawab.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja daerah untuk tahun
yang berakhir sampai 31 Desember 2012-2014

NO	Uraian	Anggaran			Realisasi
		thn.2010	Realisasi	%	thn.2013
A	Belanja				
1	Belanja pegawai	3,031,479,829	3,00,737,086	99,15	2,221,968,617
2	Belanja barang	3,198,231,421	3,198,231,421	89,98	2,456,107,780
	Sub.total belanja	6,203,968,507	6,203,968,507	94,20	4,674,076,397
B	Belanja modal				
1	Belanja peralatan & mesin	278,849,000	272,089,300	97,58	166,501,500
	Sub. Total belanja	278,849,000	272,089,300	97,58	166,501,500
	Jumlah belanja	6,864,626,829	6,476,057,807	94,34	4,840,577,897

Sumber : keuangan inspektorat kabupaten enrekang (2016)

Adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) tersebut adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Secara khusus pergeseran dalam akuntansi keuangan sector public dalam akuntansi pemerintah (pengelolaan keuangan daerah) ada 6 yang terjadi, yakni dalam akuntabilitas vertical dan akuntabilitas horizontal, penusunan anggaran kinerja, pengendalian dan audit dari pengendalian dan audit keuangan menjadi pengendalian dan audit keuangan

serta kinerja, penggunaan dana APBD tidak adanya pusat pertanggung jawab dan akuntansi keuangan pemerintah daerah

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom tentunya memiliki perangkat-perangkat tersendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Hanya saja tentunya harus berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya memiliki pertanggung jawaban kepada instansi maupun pihak yang terkait dalam perseorangan keuangan daerah untuk bertugas melakukan pengawasan internal dan eksternal pengelola keuangan daerah. Pengawasan internal pengelolaan keuangan yang selain melakukan pengawasan atas uraian kas/uang memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen program oleh pemerintah daerah dari segi efisiensi dan efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan daya guna keuangan daerah. Sebagaimana yang di perhitungkan laporan realisasi keuangan untuk mengetahui efektifitas pembelanjaan daerah dalam merealisasikan program daerah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang berkompeten demi laporan realisasi anggaran secara transparan dan akurat.

Penelitian Wenny (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Dropinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan

mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Dharmawati dkk (2016) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangitahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Penelitian Ronald dkk (2010) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.

Analisis kinerja Keuangan adalah satu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksana pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ ***Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang***” (*Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Inspektoran Kabupaten Enrekang) tahun 2012-2014.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimanakah kinerja keuangan inspektorat kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dengan menggunakan Rasio Keseharian Pemerintah Kabupaten Enrekang selama 3 (tiga) tahun 2012-2014

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Keuangan ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Manfaat praktis

Dapat memberi referensi atau sumbangan pemikiran dan menganalisis kinerja keuangan guna meningkatkan dan efektifitas Kinerja Keuangan pada perkembangan yang semakin kompetitif.

2. Manfaat kebijakan

Untuk pihak pendidikan, diharapkan dapat membeikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan aturan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan yaitu tentang Pengertian Kinerja Keuangan, Tujuan Pengukuran, Indikator Kinerja Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Analisis Kinerja Keuangan, rasio-rasio keuangan, tinjauan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan tentang berbagai metode penelitian meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah kelurahan/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan pemerintah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayaran yang diberikaan kepada masyarakat Sumarjo (2010). Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran Rondonuwu (2015).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sector publik, oleh karena itu pemerintah kabupaten Enrekang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat

di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang membutuhkan system pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian sustu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansal. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi inspektorat pemerintah Kabupaten Enrekang dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengatur rumah tangganya sendiri Syamsi (2005)

a. Kemampuan structural organisasinya

Struktur organisasi pemerintah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan aparatur

Aparat harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan keuangan

Pemerintah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan Inspektorat harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam Halim (2007)

- a. Menilai kemandirian keuangan inspektorat dalam membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah.
- b. Mengukur aktivitas dan efisiensi merealisasikan pendapatan pemerintah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan
- d. Mengukur kontribusi masing-masing pendapatan dalam pemebentukan pendapatan pemerintah
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu

3. Indikator Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan harus mencakup. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemudah indikator kinerja keuangan meliputi :

a. Indikator Masukan (*inputs*)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*process*)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya : ketaatan pada perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat tercapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator Hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kelurahan kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai

e. Indikator manfaat (*Benefit*)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat

f. Indikator Dampak (*Impact*)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan realisi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah, pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBDN/APBD. Laporan realisi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, disebutkan unsur yang cakup dalam laporan realisi anggaran terdiri atas :

1) Pendapatan adalah suatu penerimaan kas pemerintah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, pemudah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemuda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori

- a) Pendapatan asli pemerintah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi.
- b) Dana perimbangan, merupakan dana bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
- c) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbangan dari pemerintah pusat.

2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemuda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu

- a) Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi tidak dirasakan secara

langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.

b) Belanja pelayanan public, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya

c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemuda terutama dimasukkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, pembiayaan dikelompokkan menjadi :

a) Sumber pemerintah daerah, yaitu :

- Sisah lebih anggaran penerimaan tahun lalu.
- Penerimaan pinjaman dan modal obligasi
- Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.
- Transfer dari dana cadangan.

b) Sumber pengeluaran daerah

- Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
- Penyertaan modal
- Transfer ke dana cadangan
- Sisah lebih anggaran tahun sekarang.

b. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal yang tertentu

c. Catatan diatas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisi

anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan di atas dilaporkan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang diperlukan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. Analisis Kinerja Keuangan

Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggung jawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian Kinerja Keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan dalam mengelola keuangan adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2007) Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Halim (2007) adalah:

- a. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
- b. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah.
- c. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun membeli obligasi

Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain: Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Keseharian.

6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Keuangan		
Rendah sekali	0%- 25%	Intruktif
Rendah	25%- 50%	Konsultatif
Sedang	50%- 75%	Partisipatif
Tinggi	75%- 100%	Delegatif

Sumber : Halim (2007)

7. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Muhammad Mahsun (2009), adalah

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

8. Rasio keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dan yang dialokasikan untuk Belanja Operasi persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut Halim (2007)

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti beberapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

Penelitian Wibowo (2009) yang berjudul Analisis kinerja keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Kharisma Prima Abadi Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan analisis bahwa profitabilitas perusahaan pada periode tahun 2009-2011 PT Kharisma Prima Abadinet profit margin dan return on equity mengalami kenaikan, sedangkan untuk gross profit margin dan return on investment mengalami penurunan, namun semuanya itu masih mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya karena masih di atas standar industri. Untuk solvabilitas dan likuiditas terjadi kenaikan yang berarti, tetapi dalam standar rata-rata industri nilai net working capital pada likuiditas dan ratio of owners equity pada solvabilitas kurang baik karena berada dibawah rata-rata.

Penelitian Rahayu dkk (2009) yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah Kota Jambi masih sangat rendah, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi dan tingkat

kemandirian keuangan daerah masih rendah. Dari sisi penerimaan daerah dilihat dari efisiensi dan efektivitas PAD sudah efisien dan efektif.

Penelitian Dharmawati dan Irmadariyani (2016) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangitahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Penelitian Fambayun (2014) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio luas kemandirian keuangan instruktif dengan rata-rata 6,84%, rasio efektivitas 120,62% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi dengan rata-rata sebesar 2,40%, rasio belanja rutin aktivitas terhadap APBD adalah 62,89% lebih besar dari rasio aktivitas pembangunan pengeluaran terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata 26,08% dan pertumbuhan Rasio terdiri dari PAD 17,88%, pendapatan sebesar 13,35%, 13,92% dari rutinitas pengeluaran dan belanja pembangunan sebesar 14,67%.

Penelitian Pangestu (2015) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Usaha Tahu – Tempe “Wenwin” di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi kemudian menganalisis dengan melihat perbandingan rasio-rasio keuangan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa usaha Tahu–Tempe “Wenwin” memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, dilihat dari pengukuran rasio keuangannya. Rasio likuiditas pada tahun 2013 berdasarkan pengukuran current ratio 5,16 dan hasil pengukuran quick ratio 5,15 dan pada tahun 2014 current ratio meningkat menjadi 22,92 dan quick ratio menjadi 22,91. Rasio solvabilitas pada tahun 2013 menunjukkan pendanaan hutang sebanyak yaitu 14 %, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 3 % karena sebagian hutang telah dibayar. Rasio profitabilitas pada tahun 2013 menunjukkan Gross profit margin sebesar 46 %, Net profit margin sebesar 37 %, ROI sebesar 91 % dan ROE sebesar 107 %. Pada tahun 2014 mengalami penurunan yaitu Gross profit margin menjadi sebesar 41 %, Net profit margin sebesar 35 %, ROI sebesar 64 % dan ROE sebesar 67 %, Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kemampuan usaha ini dalam memperoleh laba, karena posisi rasio berada pada kriteria yang baik.

Penelitian Wenny (2012) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Dropinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian Dewa (2015) yang berjudul Analisis Kinerja Keuanganpt Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang telah dilakukandengan

menggunakan instrumen analisis yang telah disebutkan di atas bahwa: (1) rasio likuiditas yang telah diukur dengan menggunakan cr adalah il liquid sedangkan qr adalah liquid; (2) solvabilitas yang telah diukur dengan menggunakan dar dan der dipecahkan; (3) kegiatan yang telah diukur dengan menggunakan rto dan ito efisien. sementara itu, $tato$ yang tidak efisien; (4) profitabilitas yang telah diukur dengan menggunakan gpm , npm , dan roa efisien. sementara itu, roe tidak efisien.

Penelitian Ronald dkk (2010) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.

Penelitian Rahmayanti (2016) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Penelitian wijaya (2012) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pada pemerintah kota surakarta dan pemerintah kota Yogyakarta secara keseluruhan sudah baik, karena dari 6 rasio hanya rasio

kemandirian yang kurang efektif. Pada kota surakarta dibuktikan dengan rasio kemandirian yang memiliki pola hubungan instruktif. Rasio efektifitas menunjukkan adanya peningkatan efektifitas kinerja. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Surakarta sudah efisien dalam memungut PAD. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa prioritas pengalokasian belanja daerah lebih ditekankan pada belanja rutin daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selanjutnya pada kota Yogyakarta dibuktikan dengan rasio kemandirian yang menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Rasio efektifitas menunjukkan adanya penurunan efektifitas kinerja namun masih memenuhi target yang ditetapkan. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Yogyakarta sudah efisien dalam memungut PAD. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa prioritas pengalokasian belanja daerah lebih ditekankan pada belanja rutin daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Wibowo (2009)	Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada PT.Kharisma Prima Abadi Yogyakarta	Metode analisis kuantitatif	Hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas perusahaan pada periode tahun 2009-2011 PT Kharisma Prima Abadinet <i>profit margin</i> dan <i>return on equity</i> mengalami kenaikan, edangkan untuk <i>gross profit margin</i> dan <i>return on investment</i> mengalami penurunan, namun semuanya itu masih mampu dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya karena masih di atas standar industri. Untuk solvabilitas dan likuiditas terjadi kenaikan yang berarti, tetapi dalam standar rata-rata industri nilai <i>net working capital</i> pada likuiditas dan <i>ratio of owners equity</i> pada solvabilitas kurang baik karena berada dibawah rata-rata.

2	Rahayu dkk (2009)	Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi.	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah Kota Jambi masih sangat rendah, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah. Dari sisi penerimaan daerah dilihat dari efisiensi dan efektivitas PAD sudah efisien dan efektif.
3	Dharmawati dkk (2016)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi (<i>Financial Ratio Analysis of</i>	Metode analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD pemerintah Kabupaten Banyuwangitahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi dari Berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektifitas menunjukkan bahwa

		<i>Regional Government Budget and Assessment (APBD) in the Financial Performance of Banyuwangi Government)</i>		realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.
4	Fambayun (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan	Metode analisis data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio luas kemandirian keuangan instruktif dengan rata-rata 6,84%, rasio efektivitas 120,62% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi dengan rata-rata sebesar 2,40%, rasio belanja rutin aktivitas terhadap APBD adalah 62,89% lebih besar dari rasio aktivitas pembangunan pengeluaran terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata 26,08% dan pertumbuhan Rasio terdiri dari PAD 17,88%, pendapatan sebesar 13,35%, 13,92% dari rutinitas pengeluaran

				dan belanja pembangunan sebesar 14,67%
5	Pangestu (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Usaha Tahu – Tempe “Wenwin” di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Tahu – Tempe “Wenwin” memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, dilihat dari pengukuran rasio keuangannya. Rasio likuiditas pada tahun 2013 berdasarkan pengukuran <i>current ratio</i> 5,16 dan hasil pengukuran <i>quick ratio</i> 5,15 dan pada tahun 2014 <i>current ratio</i> meningkat menjadi 22,92 dan <i>quick ratio</i> menjadi 22,91. Rasio solvabilitas pada tahun 2013 menunjukkan pendanaan hutang sebanyak yaitu 14 %, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 3 % karena sebagian hutang telah dibayar. Rasio profitabilitas pada tahun 2013 menunjukkan <i>Gross profit margin</i> sebesar 46 %, <i>Net profit margin</i> sebesar 37 %, ROI sebesar 91 % dan ROE sebesar 107 %. Pada tahun 2014

mengalami penurunan yaitu *Gross profit margin* menjadi sebesar 41 %, *Net profit margin* sebesar 35 %, ROI sebesar 64 % dan ROE sebesar 67 %, Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kemampuan usaha ini dalam memperoleh laba, karena posisi rasio berada pada kriteria yang baik.

6	Wenny (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Dropinsi Sumatera Selatan.	Metode analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan, namun, secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera
---	-----------------	---	-----------------------------	--

				Selatan.
7	Dewa (2015)	Analisis Kinerja Keuanganpt Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia	Metode analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang telah dilakukandengan menggunakan instrumen analisis yang telah disebutkan di atas bahwa: (1) rasio likuiditasyang telah diukur dengan menggunakan cr adalah il liquid sedangkan qr adalah liquid; (2)solvabilitas yang telah diukur dengan menggunakan dar dan der dipecahkan; (3) kegiatan yangtelah diukur dengan menggunakan rto dan ito efisien. sementara itu, tato yang tidak efisien; (4)profitabilitas yang telah diukur dengan menggunakan gpm, npm, dan roa efisien. sementara itu,roe tidak efisien.
8	Ronald dkk (2010)	Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan	Metode analisis deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah

		Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah		cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil
9	Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011- 2013	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.
10	Wijaya (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan	Metode analisis kualitatif dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pada pemerintah kota surakarta dan pemerintah kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009- 2010.	analisis kuantitatif	secara keseluruhan sudah baik, karena dari 6 rasio hanya rasio kemandirian yang Kurang efektif. Pada kota surakarta dibuktikan dengan rasio kemandirian yang memiliki pola Hubungan instruktif. Rasio efektifitas menunjukkan adanya peningkatan efektifitas kinerja. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemkot surakarta sudah efisien dalam memungut pad. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa prioritas pengalokasian belanja daerah lebih ditekankan pada Belanja rutin daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang Positif. Selanjutnya pada kota yogyakarta dibuktikan dengan rasio kemandirian yang menunjukkan Bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Rasio efektifitas
--	-------------------------	--

menunjukkan Adanya penurunan efektifitas kinerja namun masih memenuhi target yang ditetapkan. Rasio efisiensi Menunjukkan bahwa kinerja Pemkot Yogyakarta sudah efisien dalam memungut pad. Rasio Keserasian menunjukkan bahwa prioritas pengalokasian belanja daerah lebih ditekankan pada Belanja rutin daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang Positif.

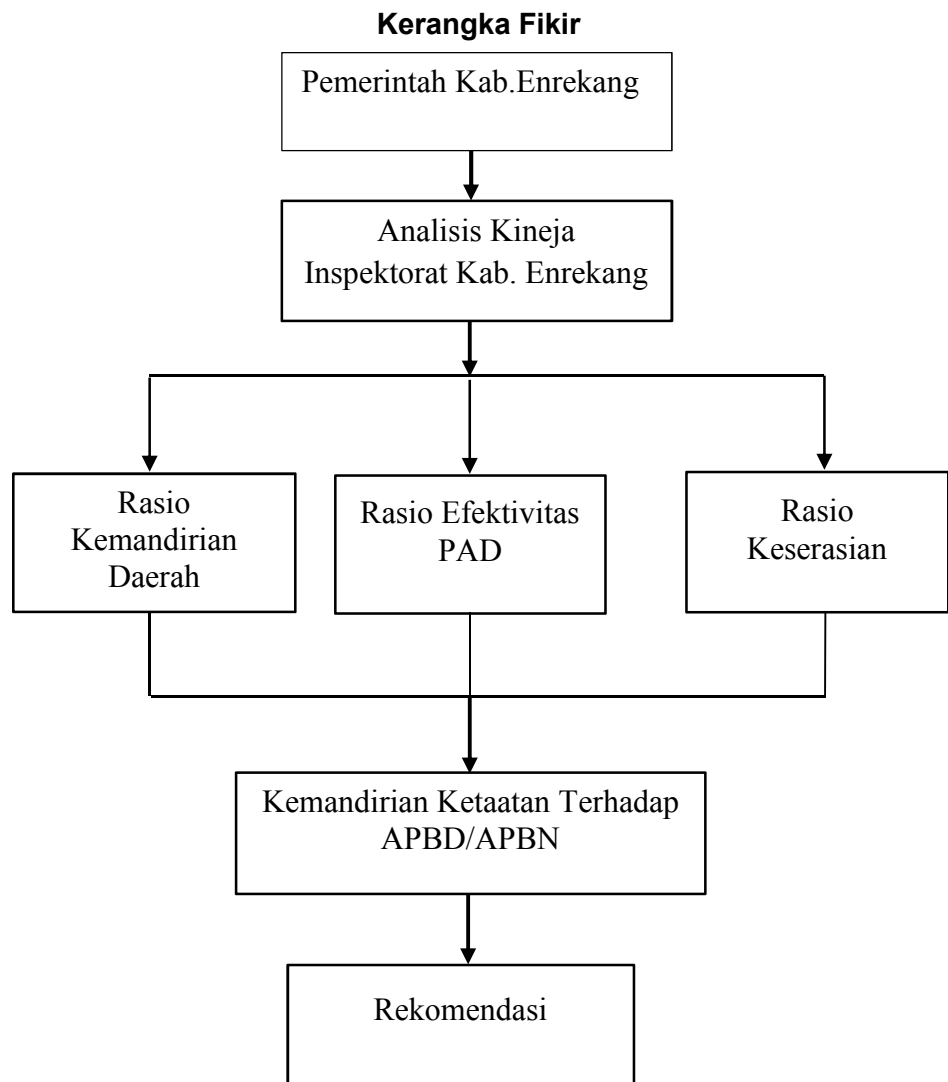
C. Kerangka Pikir

Menganalisis kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Dibawah ini tiga macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan :

Rasio kemandirian keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propensi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penapatan yang diterima.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kantor inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang yang berlokasi di jalan sultan Hasanuddin no. 1 Enrekang. Kabupaten Enrekang, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 2(dua) bulan yakni awal bulan Apri sampai akhir bulan Mei 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan adalah

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan membaca buku-buku literature serta bacaan lainnya dengan relevan dengan masalah tersebut

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek penelitian maka penulis melakukan pengamatan dan pengkajian secara langsung kekantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang masalah tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data Kuantitatif, berupa laporan keuangan, dokumen-dokumen dan keterangan tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini

- b. Data kualitatif, berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang yang dianggap berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses pengamatan dan wawancara langsung dilapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melihat informasi berupa data, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam penulisan ini.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak.

1. Rasio kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Formula rasio kemandirian menurut Mashun (2009) adalah sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah

baik kinerja pemerintah daerah

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD\ x = \frac{Realisasi\ PAD}{Anggaran\ PAD} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Muhammad Mahsun (2009), adalah :

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Rasio keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dan yang dialokasikan untuk Belanja Operasi persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut Halim (2007)

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti beberapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

E. Defenisi Operasional dan Pengukuran

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuang Pemerintah Daerah yang mencangkup beberapa parameter berupa rasio, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan daerah

$$RKKD = \frac{\text{PAD}}{\text{pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dan yang dialokasikan untuk Belanja Operasi persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Daerah Kabupten Enrekang

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak 235 km sebelah utara Makassar. Secara administrative terdiri dari 10 kecamatan, 12 kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786.01 km. terletak pada koordinat antara 3o 14' 36 sampai 03o 50' 00' Lintang Selatan dan 119o 40' 53" sampai 120o 06' 33" bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten tana Toraja, sebelah timur dengan kabupaten Luwu dan Sidrap, sebelah Selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten pada umumnya mempunyai Wilayah Topografi yang bervariasi berupa pembukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan Datar hanya 15,04%.

Jumlah penduduk pada tahun 2007 adalah 168.810 jiwa yang terdiri dari 93.939 jiwa laki-laki atau 50,57% dan 92.871 perempuan atau 49,43% dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.062 penduduknya sebagian besar pemeluk agama islam dengan mata pencaharian utama pada sector pertanian (+65%). Iklim yang terjadi di Kabupaten ini hamper sama dengan musim yang ada di Daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim

kemarau dimana musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November-Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober.

B. Inspektorat Daerah Kabupten Enrekang

Sebagaimana diketahui bahwa dengan terbitnya PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Inspektorat maka dilingkungan Pemerintah Inspektorat seluruh Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten Enrekang telah dirumuskan untuk membentuk Lembaga dan Institusi baru. Institusi ini dalam bentuk Dinas Inspektorat dimana posisinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Inspektorat.

Di Enrekang sendiri telah ditentukan mengenai perumpunan urusan pemerintahannya dimana sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) huruf L dari PP No. 41 Tahun 2007 untuk urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat harus berbentuk Dinas, dan sesuai dengan Permendagri No 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat, Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang.

Dengan demikian lembaga Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah lembaga yang baru pertama kali ada di lingkungan Pemerintah Kabupate Enrekang, yang sesuai dengan Peraturan Inspektorat Kabupaten Enrekang No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Enrekang, telah berdiri sejak tanggal 19 November 2008. Namun demikian secara riil baru melakukan tugasnya pada tanggal 14 Februari 2009. Sejak serah terima dari lembaga/institusi lama, yang disebut sebagai Dipenda (Pendapatan Keuangan Inspektorat) Kabupaten Enrekang. Secara implisit, Keuagan Inspektorat

merupakan Unit Kerja yang didalamnya mencakup bidang Pekerjaan Pendapatan, Keuangan Inspektorat, dan Asset Inspektorat sesuai dengan PP No.41 Tahun 2007 tadi.

C. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang mempunyai visi dan Misi yang merupakan pemandu arah, guna menciptakan persatuan dan kesatuan gerak bersama bagi seluruh jajaran personil pada Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang, dalam pelaksanaan tugas dan tercapainya tujuan organisasi.

a. Visi

“Meningkatkan Pendapatan belanja oprasional dan dan belanja modal Pendayagunaan Yang Optimal, Disertai Manajemen Keuangan yang Profesional dan Akuntabel akan Memperkuat Otonomi Daerah”

b. Misi

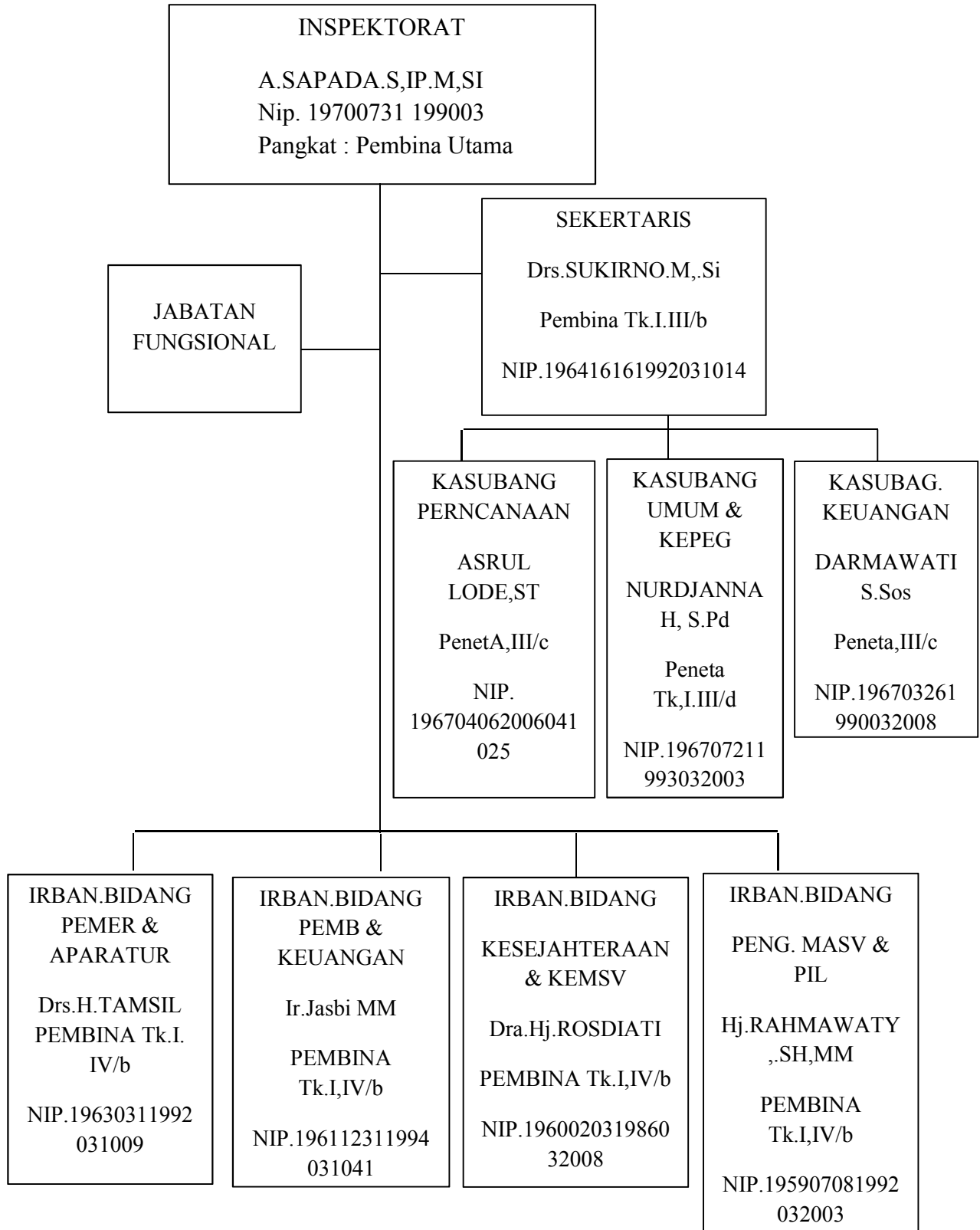
Misi yang digunakan dalam merealisasikan Visinya adalah:

1. Menyelenggarakan/mengupayakan pembinaan manajemen dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, Belanja Operasional dan Belanja Modal Pengelolaan Keuangan.
2. Menyusun proses penatausahaan keuangan Inspektorat, Pendapatan Belanja Operasional dan belanja modal.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif dan transparan dalam penyelenggaraan system Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap rangkaian proses peningkatan pengelolaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang.

D. Struktur Organisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang

Gambar 1 Struktur Organisasi



E. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Enrekang:

I. Inspektur

Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah, yaitu:

1. Perumusan dan menetapkan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra Kota;
2. Perumusan kebijakan perencanaan program pengawasan;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
4. Pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
5. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengawasan;
8. Pengawasan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
3. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
4. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
5. Penyelenggaraan administrasi umum;
6. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;

7. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
8. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Inspektorat;
9. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
10. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
11. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Inspektorat;
12. Pengelolaan Keuangan Inspektorat;
13. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
14. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang di berikan oleh Inspektorat.

III. Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mengacu pada rencana kerja Inspektorat;

- 4) Pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
- 5) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas inspektorat, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 7) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
- 8) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan;
- 9) Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 10) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- 11) Penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan;
- 12) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 13) Pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat;
- 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Inspektorat.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan Inspektorat;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknik yang berkaitan dengan urusan keuangan Inspektorat;
- 5) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan Inspektorat;
- 6) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
- 7) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan Inspektorat;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Inspektur Pembantu Wilayah I

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian dan kesra.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
 - c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perekonomian dan kesra;

- d) Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

- a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
- b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan & Kemasyarakatan Wilayah I.
- c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I
- d) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan dibidang perekonomian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program pengawasan di wilayah kerja bidang perekonomian;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian;
- c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perekonomian;
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Inspektur Pembantu Wilayah II

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
 - c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan belanja;
 - d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Inspektur Pembantu Wilayah III

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang Aset.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja pengawasan bidang Aset;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang Aset;

- c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Aset;
- d) Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang Aset dan BUMD;
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Inspektur Pembantu Wilayah IV

- 1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - c) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - d) Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan umum dan kepegawaian;
 - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

1. Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang

2. Basis Akuntansi

Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 menggunakan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Enrekang menyusun Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar di dalam Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 menggunakan nilai historis. Aset dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya yang mengikuti sampai dengan aset tersebut dimanfaatkan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 menggunakan uang Rupiah. Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang pada Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016 penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang dimana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

disebut belanja sedangkan dalam Laporan Operasional (LO) disebut beban;

b. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari :

- Aset Lancar
- Dana Cadangan;
- Investasi Jangka Panjang;
- Aset Lainnya.
- Aset Tetap;

5. Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang, terdiri dari :

- Kewajiban Jangka Pendek;
- Kewajiban Jangka Panjang

6. Ekuitas adalah kekayaan bersih Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kabupaten Enrekang

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan

digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Enrekang yang didapat dari Inspektorat Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang, adapun analisis keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang disajikan pada uraian berikut.

TABEL 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA INSPEKTORAT
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2012

No	Uraian	Anggaran Tahun2012	Realisasi	Realisasi Tahun 2012
A	Pendapatan			
B	Belanja			
	Belanja operasional			
1	Belanja Pegawai	2.541.161.671	2.438.917.702	2.145.631.686
2	Belanja Barang	1.583.407.500	1.575.790.096	1.447.653.191
	Sub. Total belanja operasional	4.124.571.171	4.041.707.798	3.593.284.877
C	Beanja modal			
1	Belanja peralatan & mesin			33.082.000
	Sub. Total moda			33.082.000
	Jumlah belanja	4.124.571.171	4.041.707.798	3.593.284.877
	Surplus/Defisit	-4.124.571.171	-4.041.707.798	-3.593.284.877

Sumber 2017 : Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang

TABEL 2
REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA TAHUN 2013

No	Uraian	Anggaran Tahun2013	Realisasi	Realisasi Tahun 2013
A	Pendapatan			
B	Belanja			
	Belanja operasional			

1	Belanja Pegawai	2.336.705.470	2.221.968.671	2.438.917.702
2	Belanja Barang	2.533.744.571	2.452.107.780	1.575.790.096
	Sub. Total belanja operasional	4.900.450.041	4.674.076.397	4.014.707.798
C	Beanja modal			
1	Belanja peralatan & mesin	167.319.000	166.501.500	
	Sub. Total modal	167.319.000	166.501.500	
	Jumlah belanja	5.067.769.041	4.840.577.897	4.014.707.798
	Surplus/Defisit	-5.067.769.041	-4.840.577.897	4.014.707.798

Sumber 2017 : Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang

TABEL 3

REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA TAHUN 2014

No	Uraian	Anggaran Tahun 2014	Realisasi	Realisasi Tahun 2014
A	Pendapatan			
B	Belanja			
1	Belanja operasi			
	Belanja Pegawai	3.031.479.829	3.005.737.086	2.221.968.617
2	Belanja Barang	3.554.298.000	3.198.231.421	2.452.107.780
	Sub. Total belanja operasional	6.585.777.829	6.203.968.507	4.674.076.397
C	Beanja modal			
1	Belanja peralatan & mesin	278.849.000	271.089.300	661.501.500
	Sub. Total belanja	278.849.000	271.089.300	661.501.500

modal

Jumlah belanja	6.864.626.829	6.476.057.807	4.840.577.897
Surplus/Defisit	-6.864.626.829	-6.476.057.807	-4.840.577.897

Sumber 2017 : Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang

Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan, Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2014. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang pada penelitian ini adalah : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Enrekang yang didapat dari pengelolaan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2012 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} &= \frac{4041707798}{3593284877} \times 100\% \\ &= 11,2\% \end{aligned}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2012 menunjukkan jika daerah mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakat serta kontribusi sebagai pendapat sebesar 11,2%. Dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka di tahun 2012 kemandirian daerah berada pada interval 0%-25% dengan kemampuan daerah yang sangat rendah dan pola hubungan yang Instruktif. Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2013 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} &= \frac{6476057807}{4014707798} \times 100\% \\ &= 12,05\% \end{aligned}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan rasio kemandirian daerah pada tahun 2012, menunjukkan jika daerah mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakat serta kontribusi sebagai pendapat sebesar 12.05%. Dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka di tahun 2013

kemandirian daerah berada pada interval 0%-25% dengan kemampuan daerah yang sangat rendah dan pola hubungan yang Instruktif. Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

- Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2014 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} &= \frac{6476057807}{4840577897} \times 100\% \\ &= 13,3\% \end{aligned}$$

Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2014 menunjukkan jika daerah mampu membiayai diri sendiri dalam kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta kontribusi sebagai pendapat sebesar 13,3%. Dimana hal tersebut jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka di tahun 2013 kemandirian daerah berada pada interval 0%-25% dengan kemampuan daerah yang sangat rendah dan pola hubungan yang Instruktif. Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dimulai pada tahun 2012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang sebesar 11,2 sama dengan tahun 2013 sebesar 12,05 dan sebesar 13,3 ditahun 2014.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} \times = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas semakin baik kinerja keuangan daerah.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2012 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{4124571171}{4041707798} \times 100\% \\ &= 10,2\% \end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2012, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 10.2% masih berada pada interval dibawah 60% yang berarti bahwa tidak efektif.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2013 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{5067769041}{4840577897} \times 100\% \\ &= 10,4\% \end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 10.4% masih berada pada interval dibawah 60% yang berarti bahwa tidak efektif.

- Hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD pada Tahun 2014 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{6864626829}{6476057807} \times 100\% \\ &= 10,6\% \end{aligned}$$

Rasio Efektivitas PAD tahun 2014 juga masih meningkat sangat tipis dari tahun 2013, jika dimasukkan pada ukuran efektifitas keuangan pemerintah daerah sebesar 10.6% masih berada pada interval dibawah 60% yang berarti bahwa tidak efektif

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dimulai pada tahun 2012 Rasio Efektivitas PAD pada Keuangan Inspektorat 10,2 Kabupaten Enrekang, tahun 2013 sebesar 10,4, dan sebesar 10,6 di tahun 2014.

3. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belaja Operasi dan Belaja Modal secara optimal.

- Hasil perhitugan Rasio Keserasian pada Tahun 2012 dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{4.124.571.171}{33.082.000} \times 100\% \\ &= 12,46\% \end{aligned}$$

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2012 yaitu sebesar 12.46%, hal ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja daerah belum mendominasi, padahal dibutuhkan total belanja daerah yang cukup besar untuk menyokong pembangunan daerah

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2013 dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{4.900.450.041}{167.319.000} \times 100\% \\ &= 29,2\% \end{aligned}$$

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2013 yaitu sebesar 29,2% ,hal ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja daerah belum mendominasi, padahal dibutuhkan total belanja daerah yang cukup besar untuk menyokong pembangunan daerah

- Hasil perhitungan Rasio Keserasian pada Tahun 2014 dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Operasional} &= \frac{6.585.777.829}{278.849.600} \times 100\% \\ &= 23,6\% \end{aligned}$$

Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Sedangkan rasio keserasian pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,6%, hal ini tergolong masih rendah dimana rasio belanja daerah belum mendominasi, padahal dibutuhkan total belanja daerah yang cukup besar untuk menyokong pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang. Dimulai pada tahun 2012 sebesar Rp 4.124.571.171 dimana Rasio mengalami peningkatan pada Tahun 2013 Rp4.900.450.041 dan pada Tahun 2014 terjadi kenaikan lagi yaitu sebesar Rp 6.585.777.829 hal ini membuktikan bahwa Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang sudah memprioritaskan untuk belanja operasi dan belanja modal.

Tabel 4. Rasio Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang

No	Uraian	Tahun		
		2012	2013	2014
1	RKKD	11,2	12,05	13,3
2	Efektivitas PAD	10,2	10,4	10,6
3	Keserasian	12,46	29,2	23,6

Sumber: Hasil analisis keuangan

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mulai dari 11,2, 12,05, dan 13,3. Sedangkan dengan kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sebesar 10,2, 10,4, dan 10,6. Dan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten

Enrekang sebesar 12,46% ditahun 2012, ditahun 2013 sebesar 29,2% dan pada tahun 2014 sebesar 23,6%

C. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dimulai pada tahun 2012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 11,2, pada Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 12,05, dan tahun 2014 sebesar 13,3.

2. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil penelitian atau data dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2012 Rasio Efektivitas PAD sebesar 10,2, pada Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2013 sebesar 10,4, dan tahun 2014 sebesar 10,6.

3. Rasio keserasian

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata-rata, Rasio Keserasian Belanja Operasional dan Belanja Modal Kinerja Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang. Dimulai pada tahun 2012 sebesar Rp 4.124.571.171 dimana Rasio mengalami peningkatan pada Tahun 2013 Rp 4.900.450.041 dan pada Tahun 2014 terjadi kenaikan lagi yaitu sebesar Rp 6.585.777.829 hal ini membuktikan bahwa Keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang sudah memprioritskan untuk belanja operasi dan belanja modal.

Belanja Inspektorat Kabupaten Enrekang sebesar Rp 4.124.571.171 naik menjadi Rp 5.067.769.041 pada tahun 2012. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 5.067.769.041. dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan belanja Inspektorat menjadi Rp 6.864.626.829.

Total Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Inspektorat pada tahun 2012 terdiri atas : belanja pegawai sebesar Rp 2.541.163.671 dan Realisasi perbulanan sebesar Rp 2.438.917.702 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 2.145.631.686 Belanja barang sebesar Rp 1.583.407.500 dan Realisasi perbulan sebesar Rp 1.575.790.096 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 3.593.284.877 maka sub belanja Operasional sebesar Rp 4.124.571.171 dan sub total realisasi perbulan sebesar Rp4.041.707.798 sedangkan sub total Realisasi pertahunnya sebesar Rp3.593.284.877. Total belanja modal yang terdiri atas : belanja peralatan dan mesin sebesar Rp33.082.200 maka sub total belanja modal sebesar Rp 33.082.200 jumlah keseluruhan belanja operasional, belanja modal sebesar Rp 4.124.571.171 jumlah realisasi perbulan sebesar Rp 4.041.707.798 dan jumlah Realisasi pertahun sebesar Rp 3.626.366.877.

Total Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Inspektorat pada tahun 2013 mengalami kenaikan dari tahun 2012 terdiri atas : belanja pegawai sebesar Rp2.336.705.470 dan Realisasi perbulan sebesar Rp2.221.968.617 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 2.438.917.702 Belanja barang sebesar Rp 2.533.744.571 dan Realisasi perbulan sebesar Rp 2.425.107.780 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 1.575.790.096 maka sub belanja Operasional sebesar Rp 4.900.450.041 dan sub total realisasi perbulan sebesar Rp 4.674.076.397 sedangkan sub total Realisasi

pertahunnya sebesar Rp 4.041.707.798 Total belanja modal yang terdiri atas : belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 167.319.000 maka sub total belanja modal sebesar Rp 167.319.000 jumlah keseluruhan belanja operasional, belanja modal sebesar Rp 5.067.769.041 jumlah realisasi perbulan sebesar Rp 4.840.577.897 dan jumlah Realisasi pertahun sebesar Rp 4.041.707.798.

Total Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Inspektorat pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun 2013 terdiri atas : belanja pegawai sebesar Rp 3.031.479.829 dan Realisasi perbulan sebesar Rp3.005.737.086 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 2.221.968.617 Belanja barang sebesar Rp 3.554.298.000 dan Realisasi perbulan sebesar Rp3.198.231.421 sedangkan Realisasi pertahun sebesar Rp 2.452.107.780 maka sub belanja Operasional sebesar Rp 6.585.777.829 dan sub total realisasi perbulan sebesar Rp 6.203.968.507 sedangkan sub total Realisasi pertahunnya sebesar Rp 4.674.076.397 Total belanja modal yang terdiri atas : belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 278.849.000 maka sub total belanja modal sebesar Rp 278.849.000 jumlah keseluruhan belanja operasional, belanja modal sebesar Rp 6.864.626.829 jumlah realisasi perbulan sebesar Rp 6.476.057.807 dan jumlah Realisasi pertahun sebesar Rp 4.840.577.897.

Berdasarkan pada capaian kinerja keuangan indikator kinerja diperoleh bahwa rentang capaian RKKD 2012 ke 2013 meningkat sampai pada tahun 2014 sehingga berada pada kategori sedang. Untuk efektifitas PAD Kabupaten Enrekang mencapai kateogri sedang.

Sedangkan untuk rasio keserasian sehingga terjadi kenaikan diakibatkan karena anggaran 2013 sampai dengan tahun 2014 pada awal periode, yaitu tahun 2013 Rasio Belanja Operasi tergolong tinggi. Kemudian di

tahun berikutnya, yaitu tahun 2014, Rasio Belanja Operasi naik sebesar 29,2% menjadi 23,6% kenaikan yang cukup drastis Rata-rata Rasio Belanja Operasi Kabupaten Enrekang selama periode 3 tahun ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang lebih banyak menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Operasi dibandingkan untuk kegiatan Belanja Modal.

Kriteria pengukuran kinerja yang digunakan adalah target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tersebut merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Organisasi. Setiap akhir tahun, target kinerja (*performance plan*) ini akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*) sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Enrekang terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Keserasian. Rasio Keserasian adalah sudah stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran sehingga dapat dikatakan Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah mengalami kemajuan dan memperhatikan pembangunan.

B. Saran

1. Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi belanja Operasional dan Belanja Modal yang ada. Inisiatif dan kemauan Inspektorat Kabupaten Enrekang sudah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Serata melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan untuk mengantisipasi terjadinya dalam dalam pemungutan atau penerimaan potensi belanja operasional dan belanja modal. Selain itu Inspektorat Kabupaten Enrekang harus mencari alternative-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan dan hal ini memerlukan kreativitas dari

aparat pelaksanaan keuangan Inspektorat untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru melalui program kerja sama.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai Kinerja Keuangan Inspektorat dengan menggunakan lebih banyak Rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bias lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi-Selatan yaitu Kabupaten Enrekang. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian dilingkup yang lebih luas dari peneliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Anim Rahmayanti (2016) "Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo" *jurnal*
- Dharmawati dkk, (2016). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Dewa (2015). Analisis Kinerja Keuanganpt Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fambayun, (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan
- Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Hery Susanto. (2014). "Analisis perkembangan Kinerja Keuangan Daerah dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan otonomi Daerah." *Jurnal* kinerja Keuangan pemerintah daerah, otonomi daerah
- Jonathan Sarwono.(2006). *Metode Penelitian Kuantitatif &Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Pangestu, (2015). Analisis Kinerja Keuangan Usaha Tahu – Tempe “Wenwin” di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
- Rahayu dkk, (2009). Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi
- Ronald dkk (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah
- Rahmayati (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013
- Sonia Fambayun “ analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah di kabupaten Magetan” *Jurnal Kinerja Keuangan, APBD, Analisis Rasio*
- Wibowo, (2009). Analisis Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan (Studi kasus Pada PT. Kharisma Prima Abadi Yogyakarta
- Wenny (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Dropinsi Sumatera Selatan.
- Wijaya (2012). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta Dilihat dari Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2010.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
INSPEKTORAT

Jln. Sultan Hasanuddin No.444 Kab. Enrekang, Telp(0420) 21012 Fax (0420) 21553

SURAT KETERANGAN
NO. 045.2/ 37 /IRKAB/V/2018

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Sukirno, M.Si
Jabatan : Sekertaris Inspektorat Kab. Enrekang
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 444, Enrekang

Menerangkan bahwa

Nama : Nirma
Nim : 105730438513
Tempat/Tgl. Lahir : Bulo, 10 September 1993
Alama : Desa Bulo, Kec. Masalle

Penar Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Inspektorat Kab. Enrekang dengan Judul Skripsi
Analisis Kinerja Keuangan INSPEKTORAT Pemerintah Kabupaten Enrekang.”
Demikian Surat Keterangan ini dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Enrekang, 04 Mei 2018

An. Inspektur
Sekretaris,

Drs. SUKIRNO, M.Si
Nip. 19640616 199203 1 014

	3	4	5	6	7
Belanja Modal					
Belanja Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Peralatan & mesin	-	-	-	-	33,082,000
Pengadaan Meubelier	-	-	-	-	-
Pengadaan Meter	-	-	-	-	27,332,000
Pengadaan Sigma	-	-	-	-	900,000
Pengadaan Borcashi	-	-	-	-	4,950,000
Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	-
Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Belanja Asset lainnya	-	-	-	-	-
Sub Total Belanja Modal	-	-	-	-	33,082,000
JUMLAH BELANJA	4,124,571,171	3,591,616,053	423,091,745	4,041,707,798	3,626,366,877
S / DEFISIT	-4,124,571,171	-3,591,616,053	-423,091,745	-4,041,707,798	-3,626,366,877

Enrekang 31 desember 2012
Inspektur

A Sapada S, IP, M, Si
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19700731 199003 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
INSPEKTORAT KAB. ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
29 DESEMBER 2014 DAN 2013

D	URAIAN	Anggaran Thn 2014	Realisasi	%	Realisasi Th.2013
A	PENDAPATAN				
1	Pajak Daerah	0	0	0	0
2	Retribusi Daerah	0	0	0	0
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipsahkan	0	0	0	0
4	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0
B	BELANJA				
I	Belanja Operasi				
1.	Belanja pegawai	2,366,705,470	3,005,737,086	99.15	2,221,968,617
2.	Belanja Barang	2,533,744,571	3,198,231,421	89.98	2,452,107,780
3.	Bunga	-	-	-	-
4.	Subsidi	-	-	-	-
5.	Hibah	-	-	-	-
6.	Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Sub Total Belanja Operasi	4,900,450,041	6,203,968,507	94.2	4,674,076,397
II	Belanja Modal				
1.	Belanja Tanah	-	-	-	-
2.	Belanja Peralatan & Mesin	167,319,000	272,089,300	97.58	166,501,500
3.	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4.	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5.	Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6.	Belanja Asset Lainnya	-	-	-	-
	Sub Total Belanja Modal	278,849,000	272,089,300	97.58	166,501,500
	JUMLAH BELANJA	6,864,626,829	6,476,057,807	94.34	4,840,577,897
	SURPLUS / DEFISIT	-6,864,626,829	-6,476,057,807	94.34	-4,840,577,897

Enrekang 29 Desember 2014
Inspektur

A. Sapada, S.P.M.Si
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19700731 199003 1 003

FEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
INSPEKTORAT KAB. ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
29 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	Anggaran Thn 2013	Realisasi	%	Realisasi Th. 2012
PENDAPATAN				
1. Pajak Daerah	0	0	0	0
2. Retribusi Daerah	0	0	0	0
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
4. Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	0	0	0	0
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja pegawai	2,366,705,470	2,221,968,617	93.88	2,438,917,702
2. Belanja Barang	2,533,744,571	2,452,107,780	96.78	1,575,790,096
3. Bunga	-	-	-	-
4. Subsidi	-	-	-	-
5. Hibah	-	-	-	-
6. Bantuan Sosial	-	-	-	-
Sub Total Belanja Operasi	4,900,450,041	4,674,076,397	95.38	4,014,707,798
Belanja Modal				
1. Belanja Tanah	-	-	-	-
2. Belanja Peralatan & Mesin	167,319,000	166,501,500	-	-
3. Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4. Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5. Belanja Asset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6. Belanja Asset Lainnya	-	-	-	-
Sub Total Belanja Modal	167,319,000	166,501,500		
JUMLAH BELANJA	5,067,769,041	4,840,577,897	95.52	4,014,707,798
URPLUS / DEFISIT	-5,067,769,041	-4,840,577,897	95.52	-4,014,707,798

Enrekang 29 Desember 2013
Inspektur

A.Sapada, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19700731 199003 1 003



Nirma, lahir di Bulu 10 September 1993. Anak kelima dari delapan bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Lancangi dan Hania. Adapun jenjang pendidikan penulis lalui yaitu masuk ke SDN 11 Rante Tonggo mulai tahun 2001 sampai 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Anggeraja dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah Kalosi dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 penulis berhasil lulus pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1). Dan pada Tahun 2018 menyelesaikan masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Skripsi : “Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Enrekang”



Nama : Nirma

Tempat/Tgl Lahir : Bulo, 10 September 1993

Nomor Induk : 105730438513

Tgl. Yudisium : 03 Juli 2018

Pembimbing :
1. Dr.Idham Khalid.MM
2. Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Inspektorat
Pemerintah Kabupaten Enrekang